

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Senin, 2 Maret 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 7	Senin, 2 Maret 2020	Saat Malaysia Rajin Ke Balikpapan	Langkah agresif Malaysia yang ingin berperan serta dalam proyek pendukung perpindahan ibu kota RI tidak lepas dari letak geografis antara Kinabalu (Ibu Kota Negara Bagian Sabah) dan Balikpapan yang relative dekat dan berada dalam satu pulau Borneo. Jarak antara Kinabalu-Balikpapan kurang lebih 808kilometer atau hampir sama dengan jarak antara Jakarta-Surabaya. Investor sudah sejauh ini mengincar bisnis di sector pertanian dan infrastruktur. Namun, juga ada peluang untuk membangun pabrik. Selain Malaysia, investor yang datang langsung ke Balikpapan adalah Norwegia dan China. Norwegia ingin bermitra pada energi terbarukan dan kota modern. Adapun, China lebih suka membangun infrastruktur jembatan laut penghubung Balikpapan-Penajam Paser Utara. Pemerintah Kota Balikpapan diketahui menawarkan beberapa proyek antara lain Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan jalan tepi pantai atau coastal road dengan Panjang sekitar 7,5 km yang membentang sepanjang Pelabuhan Semayang hingga Bandar Udara Internasional Spinggan.
2	Bisnis Indonesia Halaman 8	Senin, 2 Maret 2020	Hindari Tumpang Tindih Data	Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Pengembangan Pusat Data Nasional, pada Jumat pekan lalu, telah mencatat bahwa 84 dari target 85 peta tematik telah selesai. Satu peta tematik yang tersisa yakni menyangkut dengan batas administrasi desa. Kepala Negara menyatakan saat ini pemerintah menyusun pusat data nasional yang dimulai dengan kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta digagas oleh pemerintah sejak 2016, dan tahun ini diharapkan kompilasi seluruh peta tematik rampung. Menurut Presiden Jokowi, tumpang tindih data antarinstansi pemerintah harus diakhiri karena berisiko membuat duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi. “Karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri,” ujarnya. Berdasarkan hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 2018, saat ini terdapat 2.700 pusat dana pada 630 instansi pemerintah pusat dan daerah.
3	Bisnis Indonesia Halaman 20	Senin, 2 Maret 2020	Hunian & Pergudangan Bakal Bertumbuhan	Sektor pergudangan dinilai akan tumbuh di koridor jalan tol menyusun konstruksi beberapa ruas infrastruktur transportasi darat itu di berbagai daerah yang segera memasuki tahap penyelesaian. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebelumnya mencatat konstruksi 24 ruas jalan tol ditargetkan selesai pembangunannya hingga akhir 2020. Dukungan infrastruktur itu diharapkan berdampak pada pengembangan properti. Aleviery Akbar, penilai

				<p>properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Hendara dan Rekan (KJPPHAR), mengatakan bahwa selain perumahan, salah satu subsector property yang akan mengambil keuntungan dari ruas tol baru adalah pergudangan. Alasannya, pertumbuhan di bidang usaha logistic dan distribusi barang meningkat pesat sehingga bias mendorong adanya permintaan gudang baru di kawasan sepanjang ruas jalan tol.</p>
4	Bisnis Indonesia Halaman 21	Senin, 2 Maret 2020	Tidak Akan Ada Lagi Lelang Ganda	<p>Selama ini, terjadi lelang ganda ketika calon investor berniat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan memanfaatkan air dari bendungan. Di satu sisi, lelang dilakukan oleh Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. Akan tetapi, di sisi lain, selanjutnya, pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR harus mengikuti lelang yang digelar oleh Kementerian PUPR harus mengikuti lelang yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal itu tidak menjamin bahwasanya pemenang lelang di Kementerian PUPR bisa memenangi lelang di Kementerian PUPR. Akibatnya, lelang ganda ini “mematikan” minat investor menggarap PLTMH. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Fauzi Idris mengatakan bahwa sebelum PUPR telah melakukan lelang untuk enam proyek PLTMH dan sudah ada yang ditetapkan pemenangnya. Keenam bendungan itu adalah Gerak Serayu, Jatibarang, Gerak Batanghari, Pandan Duri, Titab, dan Karet Jatimlerek.</p>
5	Bisnis Indonesia Halaman 7	Sabtu, 29 February 2020	Pemerintah Mulai Susun PP NSPK	<p>Pemerintah mulai merancang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang merupakan turunan dari RUU Cipta Karya. NSPK adalah pedoman yang dirancang oleh kementerian dan Lembaga (K/L) bagi Pemda untuk melaksanakan urusan pemerintah yang didesentralisasikan ke daerah. Sebagai informasi, RUU Cipta Kerja Bakal mengubah paradigma perizinan dari license based approach yang berlaku sekarang menjadi risk based approach. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menyebut bakal ada 36 PP dan 7 Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung implementasi perizinan dalam RUU Cipta Kerja.</p>
6	Kompas halaman 15	Senin, 2 Maret 2020	Kajian Ibu Kota Baru Belum Final	<p>Aktivitas lingkungan mempertanyakan kajian lingkungan hidup strategis lokasi ibu kota baru yang disusun pemerintah. Kajian itu dinilai masih mengabaikan daya dukung lingkungan. Pemerintah menyiapkan berbagai kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS setelah menggunakan ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Sepaku.</p>

				<p>Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Sambora, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beberapa kalangan meminta pemerintah melibatkan public dalam proses penyusunan KLHS agar mendapatkan kajian daya dukung lingkungan lokasi ibu kota negara baru secara komprehensif. Dinamisor Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim Pradarma Rampung, di Balikpapan, Kamis (27/2/2020), mengalakan setidaknya terdapat 90 lubang tambang di sekitar lokasi ibu kota baru di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jika terjadi pembangunan besar-besaran, ia khawatir wilayah di sekitarnya akan semakin rentan bencana</p>
7	Kompas halaman 15	Senin, 2 Maret 2020	Mimpi Calon Ibu Kota Baru dan Bayang – Bayang Krisis Air	<p>Di tengah perkembangan Kota Balikpapan dan wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, masih banyak warga Balikpapan yang mesti berjibaku demi mendapatkan air bersih. Februari 2020 ini Balikpapan genap berusia 123 tahun, Baliho bertuliskan “Balikpapan Nyaman, Penyangga Ibu Kota negara belum resmi pindah ke Kaltim, Balikpapan merayakan rencana pemindahan tanpa embel embel “calon” di depan frasa “penyangga ibu kota negara” dalam jargon itu. Saat mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.” Wajar jika wacana pemindahan disambut gegap gempita warga Kaltim. Banyak proyek strategis nasional akan dibangun di Kaltim, tak terkecuali Balikpapan yang berbatasan langsung dengan penajam Paser Utara. Bahkan, setelah pengumuman lokasi calon ibu kota negara baru, berbagai seminar dan diskusi bertema pemindahan ibu kota dilaksanakan di hotel – hotel Balikpapan.</p>
8	Bisnis Indonesia Halaman 21	Senin, 2 Maret 2020	Progres Pembangunan Tol Serpong – Cinere	<p>Perkerrja menggunakan alat berat menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Serpong – Cinere di Kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (1/3). Progres konstruksinya jalan tol yang memiliki Panjang 10,4 kilometer tersebut hingga akhir Januari 2020 telah mencapai 81,12% dan ditargetkan dapat beroperasi sebelum Lebaran 2020</p>

Judul	Saat Malaysia Rajin Ke Balikpapan	Tanggal	Senin, 2 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Langkah agresif Malaysia yang ingin berperan serta dalam proyek pendukung perpindahan ibu kota RI tidak lepas dari letak geografis antara Kinabalu (Ibu Kota Negara Bagian Sabah) dan Balikpapan yang relative dekat dan berada dalam satu pulau Borneo. Jarak antara Kinabalu-Balikpapan kurang lebih 808 kilometer atau hampir sama dengan jarak antara Jakarta-Surabaya. Investor sudah sejauh ini mengincar bisnis di sector pertanian dan infrastruktur. Namun, juga ada peluang untuk membangun pabrik. Selain Malaysia, investor yang datang langsung ke Balikpapan adalah Norwegia dan China. Norwegia ingin bermitra pada energi terbarukan dan kota modern. Adapun, China lebih suka membangun infrastruktur jembatan laut penghubung Balikpapan-Penajam Paser Utara. Pemerintah Kota Balikpapan diketahui menawarkan beberapa proyek antara lain Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan jalan tepi pantai atau coastal road dengan Panjang sekitar 7,5 km yang membentang sepanjang Pelabuhan Semayang hingga Bandar Udara Internasional Sepinggan.		

| PEMBANGUNAN DAERAH |

SAAT MALAYSIA RAJIN KE BALIKPAPAN

Sedikitnya tiga kali rombongan orang penting dari Sabah, Malaysia, mondar-mandir ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk menangkap peluang bisnis pendukung perpindahan ibu kota negara RI.

Jeffry Prabu Prasno
jeffryprasno@bisnis.com

Kunjungan pertama dilakukan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Mohamad Shafie Apdal pada akhir September 2019. Kunjungan itu hanya berselang satu bulan setelah Presiden RI Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara.

Sepulang dari Balikpapan, Datuk Shafie mengabarkan kepada pengusaha Negeri Jiran agar mencari peluang investasi terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara RI ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Lima bulan kemudian, tepatnya pada 18 Februari 2020, Kementerian Kerajaan Tertapan dan Perumahan Sabah datang ke Balikpapan. Mereka meminta secara khusus agar ada penerbangan langsung dengan rute Balikpapan—Sabah demi mempermudah kerja sama kedua negara.

Tidak ingin kehilangan momentum, berselang dua hari kemudian yakni 20 Februari 2020, giliran 24 pengusaha Malaysia melakukan pertemuan dengan pelaku usaha Balikpapan membahas peluang bisnis yang perlu dijajaki.

Langkah agresif Malaysia yang ingin berperan serta dalam proyek pendukung perpindahan ibu kota RI tidak lepas dari letak geografis antara Kinabalu (Ibu Kota Negara Bagian Sabah) dan Balikpapan yang relatif dekat dan berada

dalam satu pulau Borneo. Jarak antara Kinabalu—Balikpapan kurang lebih 808 kilometer atau hampir sama dengan jarak antara Jakarta-Surabaya. Investor Sabah sejauh ini mengincar bisnis di sektor pertanian dan infrastruktur. Namun, juga ada peluang untuk membangun pabrik.

Selain Malaysia, investor yang datang langsung ke Balikpapan adalah Norwegia dan China. Norwegia ingin bermitra pada energi terbarukan dan kota modern. Adapun, China lebih suka membangun infrastruktur jembatan laut penghubung Balikpapan—Penajam Paser Utara.

Pemerintah Kota Balikpapan diketahui menawarkan beberapa proyek antara lain Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan jalan tepi pantai atau coastal road dengan panjang sekitar 7,5 km yang membentang sepanjang Pelabuhan Semayang hingga Bandar Udara Internasional Sepinggan.

Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Balikpapan Sentot Prasanto mengatakan rencananya akan ada reklamasi seluas 288,78 hektare dengan sumber tanah dari material laut dan sedimen drainase untuk proyek jalan tepi pantai.

"Coastal Road terbagi 8 segmen, dan sudah ada pemegangnya atau investor. Sehingga nantinya apabila investor tertarik, maka bentuknya B2B [business to business]."

katanya belum lama ini. Delapan segmen itu adalah taman menara, danau pinggir laut dan taman hutan, kota tua, pusat kumpul masyarakat baru, kota baru, taman teknologi, taman rumah, serta surga kecil.

Sementara itu, KIK memiliki luas 133,8 hektare yang berdekatan dengan Terminal Peti Kemas Kariangau dan Pelabuhan Internasional Kariangau, yang digadang-gadang bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di ibu kota negara (IKN) baru. Selain itu, KIK juga merupakan salah satu kawasan yang mendapatkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sentot menjelaskan bahwa KIK nanti akan tersambung dengan Kalimantan Utara dan Selatan. "Nanti konsepnya terintegrasi dengan Kawasan Industri Bulunminung."

Rp26,7 miliar, Rp9 miliar, dan Rp5,9 miliar. Sementara itu, dari sisi investasi total penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sejumlah Rp2,8 triliun. Rinciannya adalah PMA Rp374,6 miliar dan PMDN Rp2,5 triliun.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan bahwa banyak orang yang ingin dekat dengan ibu kota negara (IKN), terutama kebutuhan lahan. Dalam waktu dekat Kota Selatan dan Brunei Darussalam juga mau bertandang.

Gubernur Kalimantan Noor menjelaskan bahwa sejak IKN diumumkan, banyak investor yang tertarik menanamkan modal. Jepang, Korea, Arab Saudi, dan Jerman pernah menemuinya.

Berdasarkan informasi yang dia dapat dari Possidon, Joka, Widodo, Abu Dhabi siap menggelontorkan dana yang cukup

“Tingkat pengangguran kita masih 7,1%, kemiskinan kita juga masih 9%. Begitu investasi gila-gilaan masuk, [kemudian] kedua unsur ini tidak bisa diceklistkan, [itu] investasi salah arah namanya.

Rp26,7 miliar, Rp9 miliar, dan Rp5,9 miliar.

Sementara itu, dari sisi investasi total penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sejumlah Rp2,8 triliun. Rinciannya adalah PMA Rp374,6 miliar dan PMDN Rp2,5 triliun.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan bahwa banyak orang yang ingin dekat dengan ibu kota negara (IKN), terutama kebutuhan lahan. Dalam waktu dekat Kota Selatan dan Brunei Darussalam juga mau bertandang.

Gubernur Kalimantan Noor menjelaskan bahwa sejak IKN diumumkan, banyak investor yang tertarik menanamkan modal. Jepang, Korea, Arab Saudi, dan Jerman pernah menemuinya.

Berdasarkan informasi yang dia dapat dari Possidon, Joka, Widodo, Abu Dhabi siap menggelontorkan dana yang cukup

besar untuk pembangunan IKN. Jika total kebutuhan negara sebesar Rp466 triliun, itu kota Uni Emirat Arab (UAE) itu siap memenuhinya.

"Artinya tidak ada masalah soal biaya, tapi *kari* ada negara lain yang mau juga [berinvestasi]," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah menunjuk Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota dewan pengarah pembangunan IKN.

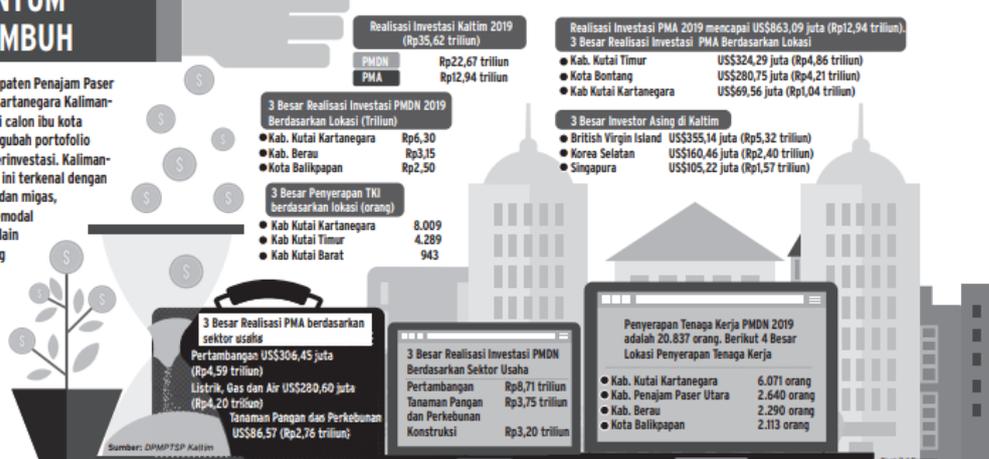
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Aji Sofyan Effendi menuturkan bahwa sebelum pengumuman IKN, orientasi investor asing hanya pada sektor migas dan penggalian. Namun, kini cakupannya meluas mulai dari pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, lingkungan, hingga mitigasi.

Akan tetapi, Aji meminta kepada pemerintah untuk membuat kerangka acuan khusus, terutama perusahaan lokal dilibatkan dalam pembangunan proyek pendukung IKN. Lapangan kerja juga harus melibatkan penduduk setempat yang secara statistik masih banyak pengangguran.

"Ini yang belum terlihat dan harus diwaspadai. Karena kita tidak mau tingkat pengangguran kita masih 7,1%, kemiskinan kita juga masih 9%, begitu investasi gila-gilaan masuk. Kedua, 'masuk' ini tidak bisa diceklistkan, investasi salah arah namanya," ucapnya. □

MOMENTUM BERTUMBUH

Ditunjuknya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara telah mengubah portofolio investor dalam berinvestasi. Kalimantan Timur selama ini terkenal dengan sektor batu bara dan migas, namun saat ini pemodal membidik sektor lain sebagai penunjang kegiatan ibu kota negara. Berikut realisasi investasi Kalimantan Timur pada 2019.



Judul	Hindari Tumpang Tindih Data	Tanggal	Senin, 2 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 8		
Resume	Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Pengembangan Pusat Data Nasional, pada Jumat pekan lalu, telah mencatat bahwa 84 dari target 85 peta tematik telah selesai. Satu peta tematik yang tersisa yakni menyangkut dengan batas administrasi desa. Kepala Negara menyatakan saat ini pemerintah menyusun pusat data nasional yang dimulai dengan kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta digagas oleh pemerintah sejak 2016, dan tahun ini diharapkan kompilasi seluruh peta tematik rampung. Menurut Presiden Jokowi, tumpang tindih data antarinstansi pemerintah harus diakhiri karena berisiko membuat duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi. "Karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri," ujarnya. Berdasarkan hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 2018, saat ini terdapat 2.700 pusat data pada 630 instansi pemerintah pusat dan daerah.		

| PENYUSUNAN KEBIJAKAN |

HINDARI TUMPANG TINDIH DATA

Bisnis, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga memanfaatkan basis data yang sama untuk menghindari perbedaan dalam penyusunan kebijakan tata ruang, serta penyelesaian masalah yang terkait spasial.

Muhammad Khadafi
muhammad.khadafi@bisnis.com

Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Pengembangan Pusat Data Nasional, pada Jumat pekan lalu, telah mencatat bahwa 84 dari target 85 peta tematik telah selesai. Satu peta tematik yang tersisa yakni menyangkut dengan batas administrasi desa.

Kepala Negara menyatakan saat ini pemerintah menyusun pusat data nasional yang dimulai dengan kebijakan satu peta.

Kebijakan satu peta digagas oleh pemerintah sejak 2016, dan tahun ini diharapkan kompilasi seluruh peta tematik rampung.

Menurut Presiden Jokowi, tumpang tindih data antarinstansi pemerintah harus diakhiri karena berisiko membuat duplikasi anggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi.

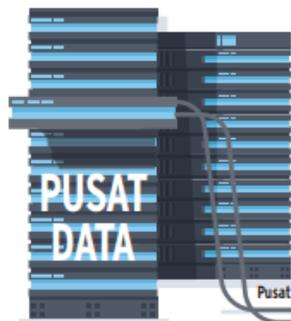
"Karena setiap kementerian mengembangkan pusat datanya sendiri-sendiri," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 2018, saat ini terdapat 2.700

pusat data pada 630 instansi pemerintah pusat dan daerah. Bila dirata-rata, ada empat pusat pada setiap instansi. Dengan demikian, secara nasional utilitas pusat data dan perangkat keras hanya mencapai sekitar 30% dari kapasitas.

Presiden memberi gambaran, salah satu tumpang tindih data

“**Secara nasional utilitas pusat data dan perangkat keras hanya mencapai sekitar 30% dari kapasitas.**”



Pemerintah tengah mengembangkan satu pusat data sebagai bagian dari kebijakan satu peta untuk pengambilan dan penataan kebijakan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat ribuan pusat data yang dikembangkan oleh instansi pusat dan daerah.

Sumber: Setkab, diolah. BISNIS/TRI UTOMO

yang menyebabkan hambatan kegiatan investasi mengenai lahan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Berdasarkan data Presiden, sekitar 40,6% lahan di Indonesia memiliki masalah administrasi karena tumpang tindih kepemilikan maupun pengelolannya.

Jumlah lahan yang tumpang tindih itu diperkirakan mencapai 77,3 juta hektare.

"Ini jadi PR [pekerjaan rumah] kita, dan itu menimbulkan sengketa lahan, dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha," kata Jokowi.

Selanjutnya, Presiden memberikan arahan bila diperlukan payung hukum untuk menyelesaikan hal itu, agar segera disiapkan.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menuturkan pemerintah berencana membangun pusat data nasional.

"Itu akan ditindaklanjuti dan kita harapkan data center itu di tahun 2020 ini bisa segera diproses agar sudah jadi dan siap

digunakan paling lambat tahun 2023," katanya.

Dia menilai bahwa pusat data dan lalu lintas data baik di dalam negeri maupun antarnegara memiliki sejumlah kendala terkait dengan informasi sensitif di dalamnya.

"Misalnya data-data spesifik terkait dengan pemilik data, data-data keuangan, data-data kesehatan secara teknis nanti dibicarakan lebih lanjut di dalam koordinasi bersama menteri Menko Perekonomian," kata Menkominfo.

Menurut Menkominfo, keberadaan pusat data nantinya untuk mengatur dan mempercepat pengambilan keputusan investasi, oleh pelaku usaha dalam hal ini untuk investor-investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Peraturan Menteri yang dihasilkan, menurut Menkominfo, itu memenuhi semua kepentingan, baik perlindungan data terhadap pemilik data, keamanan data, kedaulatan data di sisi yang satu, dan di sisi yang lain sektor usaha atau investasi dapat dilaksanakan dengan baik. ■

Judul	Hunian & Pergudangan Bakal Bertumbuhan	Tanggal	Senin, 2 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 20		
Resume	<p>Sektor pergudangan dinilai akan tumbuh di koridor jalan tol menyusun konstruksi beberapa ruas infrastruktur transportasi darat itu di berbagai daerah yang segera memasuki tahap penyelesaian. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebelumnya mencatat konstruksi 24 ruas jalan tol ditargetkan selesai pembangunannya hingga akhir 2020. Dukungan infrastruktur itu diharapkan berdampak pada pengembangan properti. Aleviery Akbar, penilai properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Hendara dan Rekan (KJPPHAR), mengatakan bahwa selain perumahan, salah satu subsector property yang akan mengambil keuntungan dari ruas tol baru adalah pergudangan. Alasannya, pertumbuhan di bidang usaha logistic dan distribusi barang meningkat pesat sehingga bias mendorong adanya permintaan gudang baru di kawasan sepanjang ruas jalan tol.</p>		

| KAWASAN JALAN TOL |

Hunian & Pergudangan Bakal Bertumbuhan

Bisnis, JAKARTA — Sektor pergudangan dinilai akan tumbuh di koridor jalan tol menyusul konstruksi beberapa ruas infrastruktur transportasi darat itu di berbagai daerah yang segera memasuki tahap penyelesaian.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebelumnya mencatat konstruksi 24 ruas jalan tol ditargetkan selesai pembangunannya hingga akhir 2020. Dukungan infrastruktur itu diharapkan berdampak pada pengembangan properti.

Aleviery Akbar, penilai properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Hendra dan Rekan (KJPPHAR), mengatakan bahwa selain perumahan, salah satu subsector properti yang akan mengambil

keuntungan dari ruas tol baru adalah pergudangan.

Alasannya, pertumbuhan di bidang usaha logistic dan distribusi barang meningkat pesat sehingga bisa mendorong adanya permintaan gudang baru di kawasan sepanjang ruas jalan tol.

“[Yang lebih banyak dikembangkan] *warehouse* dan retail untuk kawasan ruas tol yang pertumbuhan ekonominya membaik,” ujarnya, pekan lalu.

Sementara itu, untuk pengembangan perumahan, Akbar menilai peluang untuk tumbuh juga masih cukup baik mengingat dukungan infrastruktur yang memadai.

Meskipun demikian, dia menilai untuk saat ini pengembangan

kawasan di koridor jalan tol tidak akan terlalu marak mengingat kondisi industri properti masih belum dikatakan cukup baik.

Sementara itu, Commercial and Business Development Director AKR Land Alvin Andronicus mengemukakan bahwa pengembang siap membangun hunian di koridor jalan tol sepanjang ada fasilitas penunjang lain yang saling berkaitan.

Dia menggarisbawahi pertimbangan pengembang dalam membangun properti adalah infrastruktur yang memadai. “Jadi, kalau pemerintah membangun tol-tol baru untuk memudahkan transportasi, di sekitar tol itulah menjadi satu harapan baru un-

tuk developer mengembangkan kawasan baru.”

Namun, Alvin mengatakan bahwa kemudahan dalam mencapai lokasi terhadap tempat tinggal juga harus dibarengi dengan fasilitas lain yang tersedia seperti sekolah, pusat perbelanjaan, dan kesehatan.

Dia juga melihat bahwa 24 ruas jalan tol yang ditargetkan rampung di penghujung akhir tahun ini rata-rata berada di kota penyangga alias kota satelit. “Nah, di kota penyangga ini apakah ada lahan-lahan yang bisa dikembangkan?”

Alvin mengatakan bahwa AKR Land selaku pengembang selalu mengikuti perkembangan pertumbuhan dalam hal hunian atau komersial. *(Iham Budhiman)*

Judul	Tidak Akan Ada Lagi Lelang Ganda	Tanggal	Senin, 2 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Selama ini, terjadi lelang ganda ketika calon investor berniat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan memanfaatkan air dari bendungan. Di satu sisi, lelang dilakukan oleh Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. Akan tetapi, di sisi lain, selanjutnya, pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR harus mengikuti lelang yang digelar oleh Kementerian PUPR harus mengikuti lelang yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal itu tidak menjamin bahwasanya pemenang lelang di Kementerian PUPR bisa memenangi lelang di Kementerian PUPR. Akibatnya, lelang ganda ini "mematikan" minat investor menggarap PLTMH. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Fauzi Idris mengatakan bahwa sebelum PUPR telah melakukan lelang untuk enam proyek PLTMH dan sudah ada yang ditetapkan pemenangnya. Keenam bendungan itu adalah Gerak Serayu, Jatibarang, Gerak Batanghari, Pandan Duri, Titab, dan Karet Jatimlerek.		

| BENDUNGAN PENGHASIL LISTRIK |

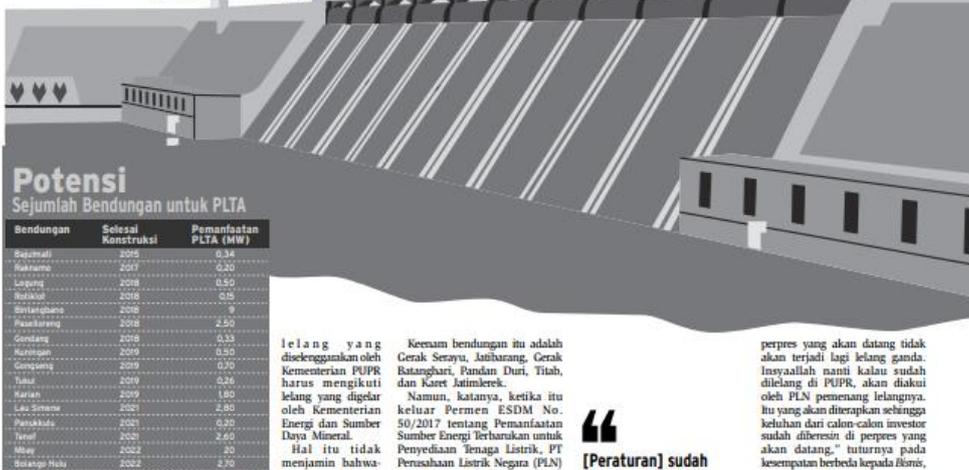
TIDAK AKAN ADA LAGI LELANG GANDA

Bisnis, JAKARTA — Pemanfaatan bendungan sebagai penghasil listrik tenaga mikrohidro mulai menemukan titik terang setelah pemerintah mengisyaratkan adanya revisi aturan terhadap lelang proyek pembangkit berkapasitas kecil tersebut.

Agnes Nisa
agnisa@bisnis.com

Pemanfaatan bendungan tidak hanya sebagai sumber air baku serta irigasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan tenaga listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) atau air (PLTA). Akan tetapi, belum banyak pembangkit yang dibangun dengan memanfaatkan air bendungan karena terkendala adanya proses lelang ganda

TERSANGKUT ATURAN



Potensi Sejumlah Bendungan untuk PLTA

Bendungan	Selesai Konstruksi	Pemanfaatan PLTA (MW)
Bekihwal	2015	0,34
Kakapanan	2017	0,20
Lagapan	2018	0,50
Batikab	2016	0,15
Batangbano	2018	0
Panikarang	2018	2,50
Gundang	2018	0,53
Kawayan	2019	0,50
Cempang	2019	0,20
Tanjir	2018	0,20
Karrah	2019	1,80
Lau Simane	2021	2,80
Panakkulu	2021	0,20
Tanah	2021	2,60
Ngay	2022	20
Sukawati Baru	2022	2,80

lelang yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR harus mengikuti lelang yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hal itu tidak menjamin bahwasanya pemenang lelang di Kementerian PUPR bisa memenangi lelang di Kementerian PUPR. Akibatnya, lelang ganda ini "mematikan" minat investor menggarap PLTMH.

Keenam bendungan itu adalah Gerak Serayu, Jatibarang, Gerak Batanghari, Pandan Duri, Titab, dan Karet Jatimlerek.

Namun, katanya, ketika itu keluar Permen ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak serta merta akan membeli listrik dari produsen hasil lelang oleh Kementerian PUPR.

Fauzi mengemukakan bahwa setelah proses komunikasi selama ini, revisi terhadap aturan tersebut sudah dilakukan oleh Kementerian ESDM.

"Sudah ditandatangani Menteri ESDM. Sekarang lagi proses di Kemenkumham untuk harmonisasi. Artinya, yang kami lelang enam itu secara otomatis nanti PLN bakal beli listriknya, bisa langsung nanti. *Eraggak* [lelang ganda], kami agak protes ada satu pekerjaan dua kali lelang," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (29/2).

Lebih lanjut, Fauzi menuturkan bahwa dibukanya keran oleh Kementerian ESDM tersebut akan memacu pengembangan energi listrik melalui tenaga air ke depan. Kementerian PUPR, ujarnya, akan menyapkan lelang bendungan yang berpotensi untuk tenaga listrik.

"Langnya bertahap. Pemen itu turun, *deur and deur*, [dari] 46 sumber potensi yang 18 siap kami *launching* untuk dilelangkan berikutnya, ada yang sudah selesai, ada yang akan selesai 2020 dan 2021,

“ [Peraturan] sudah ditandatangani Menteri ESDM. Sekarang lagi proses di Kemenkumham untuk harmonisasi.

akan ada [lelang], kemarin tertahan saja," katanya.

BANYAK PEMINAT Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air Riza Husni menyambut baik adanya revisi dari aturan tersebut karena sebenarnya PLTMH ini banyak diminati investor.

Dia menuturkan bahwa terbitnya Permen No. 50/2017 ketika itu mengindikasikan bahwa energi terbarukan belum menjadi perhatian. Namun, saat ini Presiden Joko Widodo juga mengemukakan untuk mengembangkan energi terbarukan salah satunya lewat pemanfaatan sumber daya air.

Saat ini, katanya, peraturan presiden dalam proses pembuatan untuk mengatur hal tersebut sehingga sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar-kementerian. "Memang kami harapkan dengan

perpres yang akan datang tidak akan terjadi lagi lelang ganda. Insyaallah nanti kalau sudah dilelang di PUPR, akan diikuti oleh PLN pemenang selanjutnya. Itu yang akan diterapkan sehingga keluhan dari calon-calon investor sudah diheresi di perpres yang akan datang," tuturnya pada kesempatan berbeda kepada Bisnis, Jumat (28/2).

Riza menjelaskan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan melalui PLTMH menjadi menarik karena pengembangannya lebih sederhana dengan infrastruktur bendungan sudah tersedia. Namun, tetap ada sisi negatinya karena fungsi bendungan itu sendiri sebagai irigasi sehingga pola operasinya harus mengikuti irigasi sehingga tidak bisa sembarangan.

"Jadi, ada plus minusnya, tetapi secara keseluruhan sangat menarik karena kalau pembangunan untuk skala kecil, biasanya investasi terbesar di infrastruktur bendungannya, ini bendungannya sudah dibangun oleh pemerintah tinggal tambah sedikit bisa berjalan. Jadi, insyaallah sangat menarik," katanya.

Akan tetapi, menurutnya, terdapat masalah lain yaitu ketersediaan tenaga listrik oleh PLN untuk energi terbarukan ini. Apalagi, orientasi bisnis juga masih menjadi pertimbangan.

Riza mengatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan bahwa ketika nantinya energi listrik itu ada, maka listrik yang diproduksi bisa dibeli dan dicap oleh PLN. □

Selama ini, terjadi lelang ganda ketika calon investor berniat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) dengan memanfaatkan air dari bendungan.

Di satu sisi, lelang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akan tetapi, di sisi lain, selanjutnya, pemenang



Judul	Pemerintah Mulai Susun PP NSPK	Tanggal	Sabtu, 29 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Pemerintah mulai merancang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang merupakan turunan dari RUU Cipta Karya. NSPK adalah pedoman yang dirancang oleh kementerian dan Lembaga (K/L) bagi Pemda untuk melaksanakan urusan pemerintah yang didesentralisasikan ke daerah. Sebagai informasi, RUU Cipta Kerja Bakal mengubah paradigma perizinan dari license based approach yang berlaku sekarang menjadi risk based approach. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menyebut bakal ada 36 PP dan 7 Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung implementasi perizinan dalam RUU Cipta Kerja.		

| RUU CIPTA KERJA |

Pemerintah Mulai Susun PP NSPK

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah mulai merancang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang merupakan turunan dari RUU Cipta Karya.

NSPK adalah pedoman yang dirancang oleh kementerian dan lembaga (K/L) bagi Pemda untuk melaksanakan urusan pemerintah yang didesentralisasikan ke daerah.

Sebagai informasi, RUU Cipta Kerja bakal mengubah paradigma perizinan dari *license based approach* yang berlaku sekarang menjadi *risk based approach*.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menyebut bakal ada 36 PP dan 7 Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung implementasi perizinan dalam RUU Cipta Kerja.

“Pendekatan diubah dari yang berbasis *license* ke *risk*. Jadi bisa memilah-milah, mana yang harus diawasi secara lebih ketat karena berisiko tinggi dan mana yang bisa tidak terlalu ketat karena berisiko rendah sehingga dapat dilayani

secepat-cepatnya,” kata Susiwijono, Kamis (27/2).

Apabila suatu kegiatan usaha memiliki risiko rendah, maka jenis perizinan berusahanya cukup NIB dan pengawasan tipe 1. Sementara itu, kalau risikonya menengah, maka diperlukan NIB, sertifikat standar, dan pengawasannya tipe 2 dan 3, dan jika tingkat risiko tinggi diperlukan NIB, izin dan pengawasan tipe 4.

Direktur Metodologi Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono mengatakan risiko dari setiap bidang usaha sebagaimana terlampir dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) akan dipetakan oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Seiring dengan rencana penetapan KBLI 2020, setiap K/L akan *me-review* ulang risiko dari seluruh kegiatan usaha. Meski demikian, KBLI 2020 sendiri tidak akan mengategorikan usaha berdasarkan pada risiko.

Dalam dokumen yang diterima *Bisnis*,

dalam RUU Cipta Kerja akan diterapkan konsep baru perizinan berbasis *risk based approach* yang akan memberikan dampak pada KBLI yang digunakan pada sistem OSS.

“Harapannya KBLI terbaru bisa digunakan di OSS,” ujar Sarpono, Jumat (28/2).

Masih dalam dokumen yang sama, BPS telah mendapat mandat untuk melakukan percepatan proses KBLI 2020 yang merupakan penyempurnaan KBLI 2015.

Percepatan tersebut diwujudkan melalui keluarnya Peraturan Kepala BPS lebih awal dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya, yakni dari November menjadi Juni 2020.

Per 18 Februari 2019, dari 22 K/L baru 13 K/L yang telah menyampaikan usulan perbaikan penyempurnaan KBLI 2015.

Adapun, *deadline* yang ditetapkan untuk menyampaikan usulan perbaikan adalah pada 29 Februari 2020 atau hari ini. (Muhamad Wildan)

Judul	Kajian Ibu Kota Baru Belum Final	Tanggal	Senin, 2 Maret 2020
Media	Kompas halaman 15		
Resume	<p>Aktivitas lingkungan mempertanyakan kajian lingkungan hidup strategis lokasi ibu kota baru yang disusun pemerintah. Kajian itu dinilai masih mengabaikan daya dukung lingkungan. Pemerintah menyiapkan berbagai kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS setelah menggunakan ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Sepaku. Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Sambora, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beberapa kalangan meminta pemerintah melibatkan public dalam proses penyusunan KLHS agar mendapatkan kajian daya dukung lingkungan lokasi ibu kota negara baru secara komprehensif.</p>		

Kajian Ibu Kota Baru Belum Final

Aktivis lingkungan mempertanyakan kajian lingkungan hidup strategis lokasi ibu kota baru yang disusun pemerintah. Kajian itu dinilai masih mengabaikan daya dukung lingkungan.

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan berbagai kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS setelah menggunakan ibu kota negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Sambora, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beberapa kalangan meminta pemerintah melibatkan publik dalam proses menyusun KLHS agar mendapatkan kajian daya dukung lingkungan lokasi ibu kota negara baru secara komprehensif.

Dinamiasator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Pradarma Rungang di Balikpapan, Kamis (22/2/2020), mengatakan, setidaknya terdapat 90 lubang tambang di sekitar lokasi ibu kota baru di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Jika terjadi pembangunan besar-besaran, ia khawatir wilayah di sekitarnya akan semakin rentan bencana.

Berbagai lubang tambang yang tidak direhabilitasi turut mengurangi daya dukung lingkungan wilayah sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan banjir dan longsor di Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Kutai Kartanegara.

Kamis pekan lalu, Koalisi Masyarakat Sipil beraksi di pintu masuk ruang pertemuan Hotel Novotel Balikpapan, Kaltim. Di hotel itu tengah berlangsung pertemuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan pemangku kepentingan bertema "KLHS Ibu Kota Negara". Mereka membentangkan poster yang mempertanyakan KLHS ibu kota negara baru.

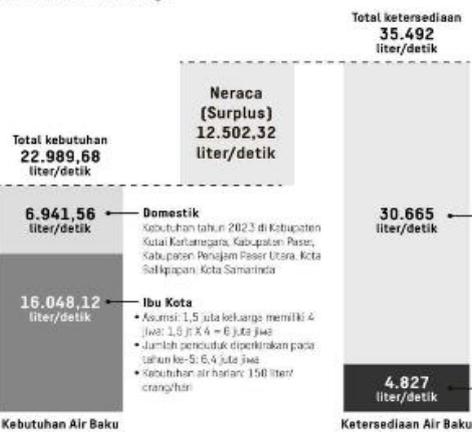
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menyampaikan kepada publik mengenai rangkuman pelaksanaan KLHS Penindahan Ibu Kota Negara pada 11 Februari 2020. Namun, ada beberapa hal yang masih dipertanyakan sebagian kalangan terkait hasil KLHS.

Belum lama ini, banjir melanda Kelurahan Riko dan Desa Bukit Subur, Penajam Paser Utara. Sebanyak 379 orang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Wilayah itu terletak sekitar 50 kilometer dari Kelurahan Pelnahulan yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada Desember lalu.

"KLHS tidak dilakukan sejak awal. Bagaimana jika daya dukung lingkungan tak memadai, apakah pemindahan ibu kota tetap dilanjutkan? Bisa jadi implikasinya terjadi krisis di wilayah tetangga," kata Pradarma.

Menurut dia, seharusnya pemerintah membuat KLHS sebelum menentukan pemindahan ibu kota. KLHS dilakukan di awal untuk bisa menjawab berbagai temuan-temuan seperti

Kebutuhan Air Baku Wilayah Ibu Kota dan Kawasan Sekitarnya



Sumber: Dokumen Masyarakat SIP dan Ibu Kota Negara 2020, Bappenas, 6. GPRS, dan data dari Bappenas/SP4

kerentanan bencana, krisis ekologi, bahkan hal lain yang berpengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya.

Teluk Balikpapan
Selain itu, KLHS juga dinilai tidak mencakup wilayah Teluk Balikpapan yang menjadi tempat hidup berbagai satwa endemik. Teluk Balikpapan juga berfungsi mendukung lingkungan wilayah sekitarnya, yakni Penajam Paser Utara dan Balikpapan. KLHS ternyata belum menetapkan kawasan Teluk Balikpapan sebagai kawasan konservasi.

"Jika ditarik garis lurus melalui aplikasi Google Earth, Kelurahan Pelnahulan, yang disebut sebagai cakun titik nol kilometer ibu kota negara baru, hanya berjarak sekitar 1 kilometer.

"Jika hulu dibendur, akan terjadi sedimentasi. Saat ini saja, sedimentasi antara 0,5 meter dan 1 meter di kawasan Teluk Balikpapan," katanya.

Pohon mangrove yang ada di

Peduli Teluk Balikpapan (PTTB), kawasan mangrove Teluk Balikpapan yang masih bagus tersisa sekitar 17.000 hektar dengan sedikinya 2.000 hektar sudah memuncu kualitasnya. Selain itu, di sana terdapat pesut pesisir, bekantan, buaya, dan berbagai jenis burung. Teluk Balikpapan juga tempat nelayan tradisional mencari ikan.

Pemerintah berencana membangun bendungan air hujan dan sungai di sekitarnya tak jauh dari teluk untuk kebutuhan air bersih ibu kota baru.

Belum final
Ditemui terpisah, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medhizum mengatakan, pemerintah masih menampung berbagai masukan untuk melengkapi KLHS. Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi untuk pengurusan perancangan jangka panjang pemindahan ibu kota negara.

Ia mengatakan, kajian pemindahan belum final. Saat ini pemerintah masih menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat mengenai air, energi, hutan, sampah, pencemaran udara, kelestarian hayati, dan hal lain yang berpotensi memiliki dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Per-

encanaan jangka panjang tersebut akan dibuat dan ditayangkan rampung pada November 2020.

Ia juga mengatakan, berbagai kajian mengenai wilayah penyanga juga dipertimbangkan. Dalam KLHS yang diterbitkan KLHK, tertera kawasan di sekitar calon ibu kota baru didominasi kawasan hutan yang memiliki nilai jasa lingkungan tinggi.

KLHS juga mencatat bahwa pusat-pusat pertumbuhan di sekeliling calon ibu kota perlu dikendalikan jika ekspansi pembangunan berlaku. Tujuannya agar pembangunan tidak memicu deforestasi dan alih fungsi lahan yang bisa memurnikan masyarakat.

Medhizum mengatakan, wilayah penyanga calon ibu kota baru akan menjadi penyuplai air, pangan, dan berbagai kebutuhan lain. Semua kajian tersebut tengah ditinjau oleh berbagai sektor di pemerintah-an. (CIP)



Rencana Pengembangan Air Baku
Rencana pengembangan: Bendungan Sepaku Sama; dan Bendungan UCI (Kabupaten Penajam Paser Utara); Bendungan Sambora I, Intake Loa Kulu (Sungai Mahakam) di Kabupaten Kutai Kartanegara; serta Bendungan Beras, Selok, Satu Jepak (Kabupaten Kutai Kartanegara).

Bangunan Pengambilan Air Eksisting
Bendungan Mangat, Bendungan Terip, dan Embung Aji (kota di Kota Balikpapan); Bendungan Sambora di Kabupaten Kutai Kartanegara; Intake Kahoi (Sungai Mahakam) dan Bendungan Lemokti Kota Samarinda.

Sejarah Panjang Balikpapan Mencari Air

Sucipto

Pertumbuhan penduduk dan bertambahnya permukiman membuat defisit air bersih di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tak terelakkan. Jika pemerintah menyiapkan mitigasi krisis air bersih sejak dini, warga tentu perlu lewat dalam pencarian air bersih yang tak pernah usai di kota petro dollar ini.

Suaebah Side (51), warga RT 010 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, baru saja selesai mengangkut paku yang dijual di pemukiman rumah. "Kalau paku, jemuran cepet kering, tetapi air sulit. Kalau hujan, air mengalir lelele, tetapi tidak bisa diminum. Serke sulit," katanya ketika ditemui di rumahnya, Rabu (26/2/2020).

Selidahnya sudah seminggu pasukan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan tak menyetuk keran rumah Suaebah. Warga pun harus beres-beres mengirit air. Akibatnya, pelajaran di sampingnya untuk dicari karena cukup menguras banyak air. Rumah Suaebah, yang berada di perbukitan, membuat suplai air kerap tak sampai. Apalagi rumahnya berada di pinggir Balikpapan yang jauh dari sumber air PDAM, sekitar 36 kilometer dari Bendungan Terip. Jika pun turun hujan air hanya mengalir lewat tengah malam dan hanya sekitar empat jam saja.

Suaebah dan suami pun harus bergadang bergantian mengisi air bersih ke semua ember dan wadah mereka untuk persediaan beberapa hari. Saat kelebihan air bersih, Suaebah harus membeli dari penjaja tangki keliling. Dalam sebulan, ia membelanjakan Rp 500.000 untuk membeli air bersih keliling tersebut.

Sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-19 ke sekitar Teluk Balikpapan, Balikpapan memang tumbuh dan aktivitas ekonominya menggalat. Belanda menjadikan Balikpapan sebagai kawasan pertama eksploitasi dan pengolahan minyak di Kalimantan. Saat ini, pengolahan minyak di Balikpapan dilakukan Pertamina Refinery Unit V Balikpapan yang merupakan salah satu Unit Bisnis Direktorat Pengolahan Pertamina yang produksinya disalurkan ke kawasan Indonesia bagian timur.

Ibarat magnet, banyak perantau datang mengadu nasib ke Balikpapan. Sayangnya, pertumbuhan demografi Balikpapan tersebut tidak didukung kemampuan menyediakan kebutuhan warganya, terutama air bersih.

Apalagi, jumlah penduduk Balikpapan terus bertambah dari 493.314 orang pada 2004 menjadi sekitar 680.000 orang (2020). Namun, pertumbuhan penduduk itu tak diimbangi peningkatan kapasitas produksi air bersih. Saat Bendungan Terip berkapasitas 250 liter per detik mulai beroperasi pada 2016, ternyata tak juga menyelesaikan masalah air bersih di Balikpapan.

Komersialisasi

Memang bukan hal mudah mendapatkan air bersih di Balikpapan. PDAM Balikpapan kerap mendapati air baru dan mengangkut zat besi tinggi saat mencari sumber air baru. Ada pula warga yang mendapati batu bara di kedalaman 5 meter saat menggali sumur.

"Saat ini, rata-rata setiap rumah hanya teralir air sekitar 12 jam sehari. Untuk wilayah yang berbukit, kami juga menyulitkan air tangki keliling. Untuk pelanggan PDAM, harganya lebih murah, yakni Rp 50.000 untuk 5.000 liter," kata Direktur Teknik PDAM Kota Balikpapan Anor Purrawanman.

Pemerintah Kota Balikpapan akan mengoptimalkan air permukaan dengan membendung air hujan dari embung waduk atau bendungan. Saat ini pemerintah tengah membekukan lahan untuk membangun Embung Aji Raden berkapasitas 150 liter per detik.

Dinamiasator Jaringan Advokasi Tambang Kaltim Pradarma Rungang mengatakan, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan berisiko menimbulkan krisis air yang semakin besar. "Dampaknya, akan terjadi komersialisasi sumber air bagi warga dan belum tentu krisis air teratasi saat ibu kota negara pindah," kata Rungang.

Judul	Mimpi Calon Ibu Kota Baru dan Bayang – Bayang Krisis Air	Tanggal	Senin, 2 Maret 2020
Media	Kompas halaman 15		
Resume	Di tengah perkembangan Kota Balikpapan dan wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, masih banyak warga Balikpapan yang mesti berjibaku demi mendapatkan air bersih. Februari 2020 ini Balikpapan genap berusia 123 tahun, Baliho bertuliskan “Balikpapan Nyaman, Penyangga Ibu Kota negara belum resmi pindah ke Kaltim, Balikpapan merayakan rencana pemindahan tanpa embel embel “calon” di depan frasa “penyangga ibu kota negara” dalam jargon itu. Saat mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartainegara di Provinsi Kalimantan Timur.” Wajar jika wacana pemindahan disambut gegap gempita warga Kaltim. Banyak proyek strategis nasional akan dibangun di Kaltim, tak terkecuali Balikpapan yang berbatasan langsung dengan penajam Paser Utara. Bahkan, setelah pengumuman lokasi calon ibu kota negara baru, berbagai seminar dan diskusi bertema pemindahan ibu kota dilaksanakan di hotel – hotel Balikpapan.		

123 TAHUN KOTA BALIKPAPAN

Mimpi Calon Penyangga Ibu Kota Baru dan Bayang-bayang Krisis Air

Sucipto

Di tengah perkembangan Kota Balikpapan dan wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, masih banyak warga Balikpapan yang mesti berjibaku demi mendapatkan air bersih.

Februari 2020 ini Balikpapan genap berusia 123 tahun. Baliho bertuliskan “Balikpapan Nyaman, Penyangga Ibu Kota Negara” terpampang di berbagai sudut kota. Meski ibu kota negara belum resmi pindah ke Kaltim, Balikpapan merayakan rencana pemindahan tanpa embel-embel “calon” di depan frasa “penyangga ibu kota negara” dalam jargon itu.

Saat mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara, Presiden Joko Widodo menyatakan, “Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.”

Wajar jika wacana pemindahan disambut gegap gempita warga Kaltim. Banyak proyek strategis nasional akan dibangun di Kaltim, tak terkecuali Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Penajam Paser Utara. Bahkan, setelah pengumuman lokasi calon ibu kota negara baru, berbagai seminar dan diskusi bertema pemindahan ibu kota dilaksana-

kan di hotel-hotel Balikpapan.

Balikpapan akan kebagian *cuan* dari megaprojek ini. Ditinjau dari jarak, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, yang dikunjungi Presiden, Desember lalu, berjarak sekitar 100 kilometer dari Balikpapan. Untuk menuju ke sana, orang dari luar kota melewati Balikpapan karena pasti turun di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan.

Di luar hiruk pikuk wacana pemindahan ibu kota, warga Balikpapan banyak yang masih dipusingkan masalah akses air bersih. Dahlan (59), warga RT 010, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, tak peduli apakah ibu kota negara resmi pindah atau tidak ke Kaltim.

“Saya memikirkan air saja susah. Harus begadang setiap malam untuk mengecek apakah air mengalir atau tidak,” katanya sambil melongok tandon air 1.200 liter di belakang rumahnya, Rabu (26/2/2020).

Dahlan bisa bernapas lega karena tandannya penuh oleh air dari perusahaan daerah air minum (PDAM). Namun, keesokan harinya, ia harus tetap begadang untuk memastikan lagi air PDAM yang biasanya mengalir ke rumahnya pukul 01.00-04.00 Wita.

Posisi rumahnya berada di perbukitan yang dikenal sebagai Gunung Bugis, sekitar 30 meter di atas permukaan laut.

Di luar hiruk pikuk wacana pemindahan ibu kota, warga Balikpapan banyak yang masih dipusingkan masalah akses air bersih.

Posisi itu membuat air sulit mengalir ke rumahnya.

Selain itu, sebelum air sampai di rumahnya, air itu sudah dipakai warga lain yang bermukim di kawasan rendah dan dekat dengan sumber air. Praktis, Dahlan dan lima anggota keluarganya hanya bisa menikmati aliran air kala warga lain terlelap dan tak membuka keran air. Tidak jarang ia begadang sia-sia karena air sama sekali tak mengalir.

Beli dari truk tangki

Saat air PDAM sama sekali tak mengalir, warga terpaksa membeli air dari truk tangki yang dijajakan pihak swasta dan PDAM. Tansar (60), warga RT 038, misalnya, membayar PDAM setiap bulan Rp 500.000 untuk lima rumah yang dikontrakkan. Di luar biaya itu, ia harus membeli air tangki yang dijajakan keliling Rp 250.000 untuk mengisi tandon air 5.000 liter miliknya.

“Saat musim kemarau panjang, harga air tangki keliling

bisa sampai Rp 100.000 untuk mengisi tandon kapasitas 1.000 liter. Padahal, kalau hari-hari biasa, harganya Rp 50.000-Rp 70.000,” katanya.

Saat membeli air, Tansar juga harus bersusah payah. Jarak rumahnya dari tepi jalan raya sekitar 200 meter. Rata-rata rumah penduduk di Gunung Bugis terletak di gang-gang kecil yang tak bisa dilewati mobil. Pembeli air seperti Tansar harus menyediakan selang tambahan untuk mengalirkan air ke tandon di rumahnya karena penjual hanya menyediakan selang 100 meter.

Penyaluran air bersih oleh PDAM Balikpapan hanya mengalir rata-rata 12 jam per hari ke 103.000 rumah warga. Dari sekitar 680.000 penduduk Balikpapan, sekitar 80 persen berlangganan PDAM. Beberapa perumahan mengandalkan *water treatment plant* yang dikelola pengembang perumahan. Sisanya, warga mengandalkan air tanah dengan membuat sumur bor. Itu pun sulit mendapatkan air yang bersih.

Dari kebutuhan 2.000 liter per detik, PDAM hanya mampu memenuhi 1.600 liter per detik. Artinya, Balikpapan masih defisit air bersih 400 liter per detik. Air bersih yang disalurkan PDAM Balikpapan bersumber dari Waduk Teritik berkapasitas 250 liter per detik, Waduk Manggar berkapasitas 1.200 liter per detik, dan

23 sumur dengan kapasitas 150 liter per detik.

Bangun embung

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Sayid MN Fadli mengatakan, pemerintah tengah membangun instalasi Embung Aji Raden berkapasitas 150 liter per detik. Saat ini, proyek masih dalam proses pembebasan lahan. Proyek itu ditargetkan selesai 2021.

Untuk memenuhi kebutuhan air dalam jangka pendek, pemkot memaksimalkan sumur bor sambil menunggu embung yang sedang dibangun. Selain itu, pemkot dalam waktu dekat akan melelang proyek desalinasi air laut berkapasitas 50 liter per detik.

Sedangkan untuk menekan harga air tangki keliling yang melambung pada musim kemarau, PDAM Balikpapan melakukan intervensi dengan menyalurkan air tangki keliling dengan harga Rp 50.000 untuk 5.000 liter air.

“Itu harga untuk pelanggan PDAM. Kami sediakan berapa saja, sesuai kebutuhan,” kata Direktur Teknik PDAM Balikpapan Arief Purnawarman.

Di tengah kebanggaan menjadi calon penyangga ibu kota negara itu, apakah pemindahan ibu kota negara kelak bisa membuat warga Balikpapan lebih mudah memperoleh hak dasar mendapatkan air bersih? Semoga saja.

SHARE

Judul	Progres Pembangunan Tol Serpong - Cinere	Tanggal	Senin, 2 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 21		
Resume	Perkerrja menggunakan alat berat menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Serpong – Cinere di Kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (1/3). Progres konstruksinya jalan tol yang memiliki Panjang 10,4 kilometer tersebut hingga akhir januari 2020 telah mencapai 81,12% dan ditargetkan dapat beroperasi sebelum lebaran 2020		

INFRASTRUKTUR 21

■ PROGRES PEMBANGUNAN TOL SERPONG-CINERE



Bisnis/Arief Hermawan P

Pekerja menggunakan alat berat menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Serpong–Cinere di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (1/3). Progres konstruksi jalan tol yang memiliki

panjang 10,14 kilometer tersebut hingga akhir Januari 2020 telah mencapai 81,12% dan ditargetkan dapat beroperasi sebelum Lebaran 2020.